



LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2017

PT. BPR NUSAMBA RAMBIPUJI

I RUANG LINGKUP TATA KELOLA

1 PENGERTIAN TATA KELOLA

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Secara garis besar dapat kami jelaskan, Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

Dari pengertian atau definisi sebagaimana tersebut di atas memberikan gambaran yang jelas bahwa agar pengelolaan usaha BPR dapat berjalan dengan baik maka BPR wajib melaksanakan Prinsip-prinsip Tata Kelola (Good Corporate Governance) didalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan prinsip-prinsip dasar tata kelola dimaksud termasuk pula pada saat penyusunan Visi, Misi, Rencana Strategis, Pelaksanaan Kebijakan dan langkah - langkah Pengawasan Internal pada seluruh jenjang organisasi.

Tata Kelola BPR menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Dimana untuk itu penilaian pelaksanaan Tata Kelola dilakukan dengan metode Self Assessment dilakukan dengan kualitatif berdasarkan data dan informasi yang sesuai keadaan yang sebenarnya.

Struktur Tata Kelola PT. BPR Nusamba Rambipuji telah merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan Laporan publikasi PT. BPR Nusamba Rambipuji posisi 31-12-2017 dapat diinformasikan bahwa Total Asset BPR



adalah sebesar Rp.32.916.060, sedangkan Modal Inti BPR terinformasi sebesar Rp.6.715.226. Besaran asset dan modal inti serta kompleksitas usaha BPR dimaksud menentukan pengelolaan dan penilaian penerapan tata kelola di PT. BPR Nusamba Rambipuji selanjutnya.

2 TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

- Meningkatkan Kinerja dan efisiensi BPR
- Melindungi kepentingan stakeholder
- Meningkatkan kepatuhan manajemen dan kepatuhan terhadap Peraturan OJK dan Perundang-Undangan yang terkini dan relevan
- Meningkatkan kesungguhan Manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan BPR
- Menarik minat dan kepercayaan

3 PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR NUSAMBA RAMBIPUJI

Prinsip-prinsip Tata Kelola di PT. BPR Nusamba Rambipuji sesuai Peraturan OJK No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola bagi BPR didasarkan pada 5(lima) prinsip penerapan Tata Kelola perusahaan yang meliputi :

1 Transparency (Keterbukaan)

- BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders)
- BPR mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, strategi BPR, kondisi keuangan dan non keuangan BPR, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, kepemilikan saham, remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham pengendali, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, penerapan fungsi kepatuhan, sistem dan implementasi tata kelola serta informasi dan fakta material.
- Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku



2 Accountability

- BPR menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders
- BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing - masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR
- BPR harus meyakini bahwa masingmasing anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh Jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan tata kelola BPR

3 Responsibility

- BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku
- BPR sebagai bagian dari masyarakat peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar

4 Independency

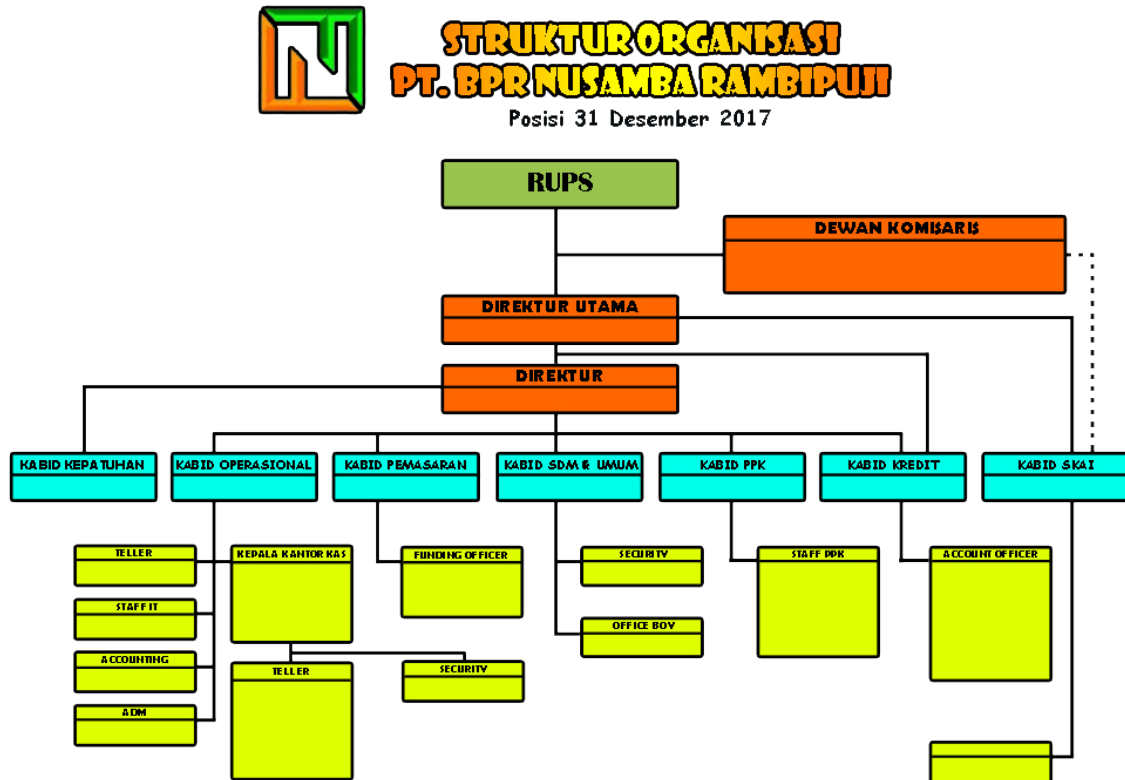
- BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest)
- BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun

5 Fairness

- BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran
- BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan



II STRUKTUR ORGANISASI TATA KELOLA PT. BPR NUSAMBA RAMBIPUJI



III PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

1 JUMLAH DAN KOMPOSISI DIREKSI

Susunan Anggota Direksi PT. BPR Nusamba Rambipuji per 31-12-2017 berdasarkan Akta Perubahan Pengurus BPR yang terakhir No.01 tanggal 02 Oktober 2017 pada Notaris Ny. Djumini Setyoadi, S.H, M.Kn adalah sebagai berikut :



Nama : Rofiul Qomar
 Jabatan : Direktur Utama
 Tempat/Tanggal Lahir : Tulungagung/5-7-1968
 Pendidikan Terakhir : S1 Ekonomi
 Lama Jabatan : 1 tahun
 Sertifikasi Direksi : 65100 1210 6 3081 2016
 Masalaku : 21-12-2021
 Pengalaman Kerja Terakhir : Direktur Utama



Nama : Agus Wahyudin
Jabatan : Direktur
Tempat/Tanggal Lahir : Sukabumi/18-8-1965
Pendidikan Terakhir : S1 Ekonomi
Lama Jabatan : 8 tahun
Sertifikasi Direksi : 65100 12106 0342 2014
Masalaku : 2-6-2019
Pengalaman Kerja Terakhir : Kepala Kas

Keterangan:

Seluruh anggota Direksi PT. BPR Nusamba Rambipuji telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan serta telah memiliki Sertifikasi Direksi. Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan)

2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

1. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR
2. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan
3. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
4. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko
5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
6. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
 - a. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
 - b. Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain
7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang



saham dalam RUPS

8. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
9. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

3 TINDAK LANJUT TERHADAP REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS

1. Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas
2. Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang
3. Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat
4. Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional

4 KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Data dan Informasi Kepemilikan saham anggota Direksi PT. BPR Nusamba Rambipuji dan Group Usaha BPR posisi 31-12-2017 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA DIREKSI	PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI
		PT. BPR Nusamba Rambipuji
1	Rofiul Qomar	Tidak Ada
2	Agus Wahyudin	Tidak Ada

5 HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Informasi hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang Saham BPR posisi 31-12-2017 adalah sebagai berikut :

1. HUBUNGAN KEUANGAN

NO	NAMA DIREKSI	HUBUNGAN KEUANGAN		
		ANGGOTA DIREKSI LAIN	DEWAN KOMISARIS	PEMEGANG SAHAM BPR
1	Rofiul Qomar	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan
2	Agus Wahyudin	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan



2. HUBUNGAN KELUARGA

NO	NAMA DIREKSI	HUBUNGAN KELUARGA		
		ANGGOTA DIREKSI LAIN	DEWAN KOMISARIS	PEMEGANG SAHAM BPR
1	Rofiul Qomar	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan
2	Agus Wahyudin	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

IV PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1 JUMLAH DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Susunan Anggota Dekom PPT. BPR Nusamba Rambipuji per 31-12-2017 berdasarkan Akta Perubahan Pengurus BPR yang terakhir No. 01 tanggal 02 Oktober 2017 pada Notaris Ny. Djumini Setyoadi, S.H, M.Kn adalah sebagai berikut :



Nama : Dingot Sinaga
Jabatan : Komisaris Utama
Tempat/Tanggal Lahir : Tapanuli Utara/7-7-1963
Pendidikan Terakhir : S2 Magister Manajemen
Lama Jabatan : 7 tahun
Sertifikasi Komisaris : 65100 1219 6 3373 2016
Masalaku : 13-7-2021
Pengalaman Kerja Terakhir : Direktur Utama



Nama : Nur Salim
Jabatan : Komisaris
Tempat/Tanggal Lahir : Tulungagung/9-4-1968
Pendidikan Terakhir : S1 Ekonomi
Lama Jabatan : 2 tahun
Sertifikasi Komisaris : 65100 12106 1120 2015
Masalaku : 13-7-2021
Pengalaman Kerja Terakhir : Direktur

Keterangan:

Seluruh anggota Dekom PT. BPR Nusamba Rambipuji telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan serta telah memiliki Sertifikasi Dekom. Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.



2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
4. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
6. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;

3 REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS KEPADA DIREKSI

1. Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas
2. Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang
3. Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat
4. Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional



4 KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Data dan Informasi Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris PT. BPR Nusamba Rambipuji dan Group Usaha BPR posisi 31-12-2017 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS
		PT. BPR Nusamba Rambipuji
1	Dingot Sinaga	Tidak Ada
2	Nur Salim	Tidak Ada

5 HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, DEWAN DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Informasi hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau pemegang Saham BPR posisi 31-12-2017 adalah sebagai berikut :

1. HUBUNGAN KEUANGAN

NO	NAMA DEWAN KOMISARIS	HUBUNGAN KEUANGAN		
		ANGGOTA DEKOM LAIN	DIREKSI	PEMEGANG SAHAM BPR
1	Dingot Sinaga	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan
2	Nur Salim	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

2. HUBUNGAN KELUARGA

NO	NAMA DEWAN KOMISARIS	HUBUNGAN KELUARGA		
		ANGGOTA DEKOM LAIN	DIREKSI	PEMEGANG SAHAM BPR
1	Dingot Sinaga	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan
2	Nur Salim	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

V KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS KOMITE

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris pada BPR dengan modal inti paling sedikit Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk paling sedikit:

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko
3. Komite Renumerasi dan Nominasi

Pengangkatan anggota Komite sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.



Berdasarkan Laporan Keuangan Publikasi PT. BPR Nusamba Rambipuji posisi 31-12-2017, dapat diinformasikan bahwa modal inti PT. BPR Nusamba Rambipuji adalah sebesar Rp.6.715.226, sehingga masih belum wajib membentuk Komite-komite.

VI PAKET/KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

Data dan informasi Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT. BPR Nusamba Rambipuji yang telah ditetapkan berdasarkan RUPS tanggal 20 Maret 2017 adalah sebagai berikut :

1 PAKET/KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI

NO	PAKET RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH ORANG	JUMLAH YANG DITERIMA SELAMA 1 TAHUN (dalam ribuan rupiah)
1	Jumlah keseluruhan gaji	2	419.100
2	Tunjangan	2	132.800
3	Tantiem	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0
5	Remunerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris	2	0
6	Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan	2	Mobil Dinas, Rumah Dinas, BPJS, Asuransi Jiwa
	Total Paket Remunerasi dan Fasilitas Lain yang Diterima Direksi selama 1 (satu) tahun	2	551.900

2 PAKET/KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS

NO	PAKET RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH ORANG	JUMLAH YANG DITERIMA SELAMA 1 TAHUN (dalam ribuan rupiah)
1	Jumlah keseluruhan gaji	2	136.600
2	Tunjangan	2	75.050
3	Tantiem	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0
5	Remunerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan	2	0



	Komisaris		
6	Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan	2	Mobil, BPJS, Asuransi Jiwa
	Total Paket Renumerasi dan Fasilitas Lain yang Diterima Dewan Komisaris selama 1 (satu) tahun	2	211.650

VII RASIO GAJI TERENDAH DAN TERTINGGI

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya. Adapun rasio gaji terendah dan tertinggi posisi 31-12-2017 di PT. BPR Nusamba Rambipuji adalah sebagai berikut :

NO	RASIO GAJI	SKALA PERBANDINGAN	
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	4,14	1,00
2	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,63	1,00
3	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,76	1,00
4	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Komisaris terendah	2,89	1,00
5	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Pegawai terendah	3,79	1,00

VIII FREKWENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Data kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris sampai dengan posisi 31-12-2017 berdasarkan daftar absensi kehadiran dan risalah rapat Dewan Komisaris PT. BPR Nusamba Rambipuji adalah sebagai berikut :

NO	NAMA ANGGOTA DEKOM	JABATAN	JUMLAH RAPAT YANG DISELENGGARAKAN DALAM 1 (SATU) TAHUN	JUMLAH RAPAT YANG DIHADIRI SECARA FISIK	JUMLAH RAPAT YANG DIHADIRI MELALUI TEKNOLOGI TELE KONFERENSI	PERSENTASE KEHADIRAN
1	Dingot Sinaga	Komisaris Utama	9	9	0	100%
2	Nur Salim	Komisaris	9	9	0	100%

Keterangan:

PT. BPR Nusamba Rambipuji telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai minimal rapat Dewan Komisaris yang wajib diselenggarakan



dalam setahun. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat

Topik/Materi Rapat Dewan Komisaris

- Evaluasi Kinerja Kantor pada bulan Desember 2016
- Evaluasi pencapaian Rencana Bisnis Bank Triwulan I tahun 2017
- Evaluasi pencapaian Rencana Bisnis Bank, pelaksanaan Tata Kelola, dan pelaksanaan Manajemen Risiko bulan April tahun 2017
- Evaluasi pencapaian Rencana Bisnis Bank, pelaksanaan Tata Kelola, dan pelaksanaan Manajemen Risiko bulan Mei tahun 2017

- Evaluasi pencapaian Rencana Bisnis Bank Semester 1 tahun 2017, pelaksanaan Tata Kelola, pelaksanaan Manajemen Risiko, pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Evaluasi atas pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan
- Evaluasi pencapaian Rencana Bisnis Bank, pelaksanaan Tata Kelola, pelaksanaan Manajemen Risiko, pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Evaluasi atas pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan bulan Juli tahun 2017
- Evaluasi pencapaian Rencana Bisnis Bank, pelaksanaan Tata Kelola, pelaksanaan Manajemen Risiko, pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Evaluasi atas pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan bulan Agustus tahun 2017
- Evaluasi pencapaian Rencana Bisnis Bank, pelaksanaan Tata Kelola, pelaksanaan Manajemen Risiko, pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Evaluasi atas pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan bulan September tahun 2017
- Evaluasi pencapaian Rencana Bisnis Bank, pelaksanaan Tata Kelola, pelaksanaan Manajemen Risiko, pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Evaluasi atas pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan bulan Oktober tahun 2017



IX JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN (INTERNAL FRAUD)

Data jumlah penyimpangan intern (internal fraud) yang terjadi sampai dengan posisi 31-12-2017 di PT. BPR Nusamba Rambipuji dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini :

INTERNAL FRAUD	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH							
	DIREKSI		DEWAN KOMISARIS		PEGAWAI TETAP		PEGAWAI TIDAK TETAP	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Dalam 1 (satu) tahun	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah diselesaikan		0		0		0		0
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum		0		0		0		0

X JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM PERDATA DAN PIDANA YANG DIHADAPI DAN MASIH DALAM PROSES PENYELESAIAN

Data jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian sampai dengan posisi 31-12-2017 yang terjadi di PT. BPR Nusamba Rambipuji dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini :

PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH	
	PERDATA	PIDANA
Telah selesai(telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam proses penyelesaian	0	0

Keterangan:

Selama tahun 2017 tidak ada permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi oleh PT. BPR Nusamba Rambipuji, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan ini, sehingga tidak ada pengaruhnya terhadap kondisi keuangan BPR.



XI TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

PT. BPR Nusamba Rambipuji memiliki komitmen untuk menangani semua transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan mematuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Data transaksi yang mengandung benturan kepentingan selama tahun 2017 di PT. BPR Nusamba Rambipuji dijelaskan pada tabel dibawah ini :

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (dalam juta rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	Joko Suyanto, SE, MM	Direktur Utama PT. Sentra Modal Harmoni	Koesprapto Hadiwibowo	Direktur Utama	Sewa Gedung Kantor	4.500	sewa gedung selama 2 tahun
2	Joko Suyanto, SE, MM	Direktur Utama PT. Sentra Modal Harmoni	Koesprapto Hadiwibowo	Direktur Utama	Sewa 2 (dua) unit Kendaraan	16.600	Sewa 2 (dua) unit kendaraan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun

Keterangan:

Dalam tahun 2017, tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan

XII PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

1 PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tentang penerapan fungsi kepatuhan, maka PT. BPR Nusamba Rambipuji telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Kepatuhan

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA KEPATUHAN ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI KEPATUHAN:

1. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR
2. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan



- peraturan perundang-undangan lain yang relevan
3. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan
 4. Memberikan konsultansi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangundangan lain
 5. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan
 6. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR
 7. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR
 8. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
 9. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang menangani Manajemen Risiko
 10. Menganalisis, mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR
 11. Mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien

Adapun aktivitas penerapan fungsi kepatuhan yang dilaksanakan di PT. BPR Nusamba Rambipuji sampai dengan posisi 31-12-2017 antara lain :

- Berdasarkan Laporan Keuangan Publikasi PT. BPR Nusamba Rambipuji posisi 31-12-2017, dapat diinformasikan bahwa modal inti PT. BPR Nusamba Rambipuji adalah sebesar Rp.6.715.226, sehingga masih belum wajib membentuk Komite-komite.
- Melakukan sosialisasi/menginformasikan ketentuan Baru dari regulator kepada unit kerja terkait
- Melakukan compliance review untuk memastikan penerapan APU dan



- PPT berjalan sesuai ketentuan yang berlaku
- Melakukan pemantauan terhadap tingkat kepatuhan atas ketentuan yang berlaku terkait prinsip prudential banking, seperti KPMM, BMPK dan NPL. Sepanjang tahun 2017, secara keseluruhan tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan terkait prinsip prudential banking
 - Melaksanakan audit terhadap Kantor Pusat, Divisi/Bagian, Kantor Cabang dan Kantor Kas
 - Melaksanakan audit proses kredit untuk tetap memelihara kualitas kredit yang baik
 - Memperbaharui rencana strategi audit dengan berpedoman pada Rencana Bisnis BPR baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang
 - Laporan Keuangan PT. BPR Nusamba Rambipuji telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, professional, dan objektif, serta menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama
 - Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adapun KAP yang ditunjuk adalah Kantor Akuntan Publik Suprihadi, SE dan Rekan sebagai Auditor PT. BPR Nusamba Rambipuji untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan BPR untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017
 - Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
 - Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko
 - Sistem pengendalian internal
 - temuan audit intern dimasukkan

INDIKATOR KEPATUHAN DI TAHUN 2017

- Komitmen terhadap OJK, Bank Indonesia dan otoritas pengawas lainnya telah dipenuhi dengan baik
- Tidak ada pelampauan maupun pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik kepada pihak terkait, maupun kepada kelompok usaha

2 PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN DAN EKSTERNAL

1 PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola



PT. BPR NUSAMBA RAMBIPUJI

Jl. Airlangga No. 26 Rambipuji

Jember

Telp. 0331 - 711439, Fax. 0331 - 714164

Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bagi BPR, maka PT. BPR Nusamba Rambipuji telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Audit Intern.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA AUDIT INTERN ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI AUDIT INTERN:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen

Adapun aktivitas pelaksanaan audit intern di PT. BPR Nusamba Rambipuji sampai dengan posisi 31-12-2017 meliputi:

- Melaksanakan audit terhadap Kantor Pusat, Divisi/Bagian, Kantor Cabang dan Kantor Kas meliputi pemeriksaan operasional seperti pemeriksaan kas, berkas pembiayaan, laporan keuangan, nominatif nasabah, kesekretariatan, persediaan, saldering jaminan, dan "On The Spot" (OTS)
- Penilaian kepatuhan terhadap pelaksanaan prosedur, ketentuan, dan peraturan perbankan yang berlaku
- Memperbaharui rencana strategi audit dengan berpedoman pada Rencana Bisnis BPR baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang

2 PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan



Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik serta dalam rangka tersedianya informasi keuangan yang berkualitas yang merupakan cerminan penerapan tata kelola yang baik, maka :

- Laporan Keuangan PT. BPR Nusamba Rambipuji telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, professional, dan objektif, serta menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama
- Akuntan Publik yang ditunjuk oleh PT. BPR Nusamba Rambipuji untuk melakukan audit telah sesuai dengan standar profesional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adapun KAP yang ditunjuk adalah Kantor Akuntan Publik Drs. Suprihadi & Rekan sebagai Auditor PT. BPR Nusamba Rambipuji untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan BPR untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017

Adapun KAP yang dipakai PT. BPR Nusamba Rambipuji dalam 2(dua) tahun terakhir adalah :

TAHUN	NAMA KAP	NO. PERJANJIAN KERJA	MASALAKU PERJANJIAN KERJA	KAP TERDAFTAR
2016	Drs. Suprihadi, SE dan Rekan	-	5-12-2016 s.d. 30-4-2017	Terdaftar di OJK
2017	Drs. Suprihadi & Rekan	299/RBP/DIR/XII/2017	20-12-2017 s.d. 28-2-2018	Terdaftar di OJK

3 PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN RISIKO

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka PT. BPR Nusamba Rambipuji telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Manajemen Risiko merangkap sebagai Pejabat Eksekutif kepatuhan dan Anti Pencucian Uang Pencegahan Pendanaan Terorisme

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI MANAJEMEN RISIKO:

1. Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi



2. Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional
3. Pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru
4. Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional dan Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki
5. Penyusunan dan penyampaian laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko

Adapun aktivitas Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal PT. BPR Nusamba Rambipuji mencakup:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
2. Sistem pengendalian internal

XIII BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan relevan, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Selain itu, penyediaan dana kepada pihak terkait juga harus diputuskan oleh Dewan Komisaris secara independen. Pelaporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan telah dilakukan secara rutin dan tepat waktu.

Data penyediaan dana di PT. BPR Nusamba Rambipuji dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini:

NO	PENYEDIAAN DANA	JUMLAH	
		DEBITUR (orang)	NOMINAL (ribuan rupiah)
1	Kepada Pihak Terkait	8	282.745
2	Kepada Pihak Tidak Terkait	25	2.839.070

Keterangan:

Sepanjang tahun 2017 tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan atas BMPK di PT. BPR Nusamba Rambipuji



XIV RENCANA BISNIS BPR

Menyikapi perubahan lingkungan eksternal yang dinamis, PT. BPR Nusamba Rambipuji senantiasa mengkaji strategi bisnisnya baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang dituangkan dalam Rencana Strategis Bank berupa Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT). PT. BPR Nusamba Rambipuji menyusun Rencana Strategis Bank dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.37/POJK.03/2016 tanggal 25 November 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.52/SEOJK.03/2016 Tanggal 23 Desember 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat.

RENCANA BISNIS PT. BPR NUSAMBA RAMBIPUJI TAHUN 2018

1. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka pendek periode 1 (satu) tahun.
 - a. Peningkatan kredit dengan cara mengoptimalkan pada sektor produktif.
 - b. Penurunan NPL dengan cara menentukan target yang telah ditentukan dan merealisasikannya.
 - c. Mengoptimalkan fungsi intermediasi bank dengan meningkatkan penempatan dana masyarakat di PT. BPR Nusamba Rambipuji, dalam
hal untuk perolehan dana yang lebih murah dibanding dana linkage dari bank lain.
 - d. Menuju BPR yang efisien dengan menjaga tingkat efisiensi.
 - e. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan PT. BPR Nusamba Rambipuji menjadikan SDMnya lebih kualitatif dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan baik Inhouse Training maupun yang diadakan pihak eksternal baik dari group PT. BPR Nusamba maupun pihak lain yang menunjang.
 - f. Menjadi Agen produk layanan digital berupa E-Cash dan pemindahan /peningkatan jaringan kantor.
 - g. Meningkatkan permodalan bank dengan meningkatkan kemampuan.
 - h. Melakukan lietrasi dan edukasi kepada nasabah yang datang ke kantor dan melalui komunitas yang ada.
 - i. Melakukan lietrasi dan inklusi kepada masyarakat luas.
 - j. Menerapkan tata kelola dana manajemen risiko di PT. BPR Nusamba Rambipuji sesuai batas pada peraturan Otoritas jasa Keuangan.



2. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka menengah periode 3 (tiga) tahun.
 - a. Peningkatan fungsi intermediasi dalam penghimpunan dan penyaluran dana.
 - b. Meningkatkan permodalan bank dengan meningkatkan kemampuan.
 - c. Menjaga kualitas dan kuantitas kredit dengan NPL dibawah 5%
 - d. Meningkatkan pelayanan bank dengan mendirikan/ membuka kantor Cabang.
 - e. Penerapan tata kelola dan manajemen risiko sesuai ketentuan.

3. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka pendek periode 5 (Lima) tahun.
 - a. Peningkatan fungsi intermediasi dalam penghimpunan dan penyaluran dana.
 - b. Meningkatkan permodalan bank dengan meningkatkan kemampuan.
 - c. Penguatan organisasi sehubungan dengan adanya kantor Cabang.
 - d. Penerapan tata kelola dan manajemen risiko secara baik sesuai ketentuan.

XV TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

1 TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN PT. BPR NUSAMBA RAMBIPUJI

Informasi kondisi keuangan PT. BPR Nusamba Rambipuji telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, diantaranya sebagai berikut:

1 Laporan Keuangan Tahunan

Laporan Keuangan Tahunan BPR telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan Keuangan Tahunan dibuat untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya, serta permulaan dari tahun komparatif terawal

2 Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

- a. Bank telah membuat dan melaporkan secara rutin triwulanan kepada Bank Indonesia.
- b. Laporan Keuangan Triwulan, wajib disajikan dalam bentuk perbandingan dengan Laporan Keuangan Publikasi sebelumnya.
- c. Bank telah menempelkan pada papan pengumuman laporan



keuangan publikasi di semua kantor (pusat,cabang dan kantor kas).

3 Laporan Keuangan Bulanan

PT. BPR Nusamba Rambipuji menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Bulanan dalam format Laporan Bulanan BPR sesuai dengan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, Laporan tersebut dijadikan sebagai dasar oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mempublikasikan laporan keuangan bulanan di website Otoritas Jasa Keuangan

2 TRANSPARANSI KONDISI NON KEUANGAN PT. BPR NUSAMBA RAMBIPUJI

PT. BPR Nusamba Rambipuji telah memberikan informasi mengenai produk PT. BPR Nusamba Rambipuji secara jelas, akurat dan terkini. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam bentuk leaflet, brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor PT. BPR Nusamba Rambipuji pada lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh nasabah, dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang disediakan melalui media social, seperti Facebook, Twitter, Instagram agar dengan mudah diakses oleh seluruh nasabah dan masyarakat.

XVI PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

PT. BPR Nusamba Rambipuji aktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, antara lain :

NO	NAMA KEGIATAN	TUJUAN PENGGUNAAN	NILAI NOMINAL (dalam ribuan rupiah)	LEMBAGA PENERIMA
NIHIL				



XVII HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) TAHUN 2017

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT	DEFINISI PERINGKAT
1,52	Sangat Baik	PT. BPR Nusamba Rambipuji telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola BPR, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh PT. BPR Nusamba Rambipuji
ANALISIS		
<p>PT. BPR Nusamba Rambipuji telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola BPR, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh PT. BPR Nusamba Rambipuji</p> <p>Hasil Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian telah cukup berkualitas yang dihasilkan dari aspek proses Tata Kelola yang cukup efektif dengan didukung oleh struktur yang sangat lengkap</p>		



XVIII PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Nusamba Rambipuji ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Nusamba Rambipuji. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Nusamba Rambipuji ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Nusamba Rambipuji, Terima Kasih.

Jember, 24 April 2018
Pengurus PT. BPR Nusamba Rambipuji

Rofiul Qomar
Direktur Utama

Dingot Sinaga
Komisaris Utama